BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Di Indonesia, permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang kompleks, karena selain volume sampah yang terus meningkat, kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah juga masih relatif rendah. Sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, konflik sosial, serta kebutuhan lahan dan biaya pengelolaan yang besar.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah penyediaan fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun sarana pendukung lainnya. Fasilitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil observasi awal,

masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi empiris di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 juga mengatur secara rinci kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, melakukan pengangkutan sampah, serta membina partisipasi masyarakat. Namun demikian, realitas di Desa Sumanggi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat struktural maupun kultural.

Fenomena pertama yang ditemukan adalah masih adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan melakukan pembakaran sampah secara langsung. Perilaku ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang melarang pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, termasuk ke sungai, serta melarang pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, kebiasaan tersebut tidak hanya mencerminkan rendahnya

kesadaran masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Fenomena kedua adalah tidak berjalannya sistem pengangkutan sampah secara rutin, meskipun sarana dan prasarana pendukung telah tersedia. Berdasarkan hasil pengamatan, pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti kendaraan pengangkut (viar) dan bak sampah, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya sistem operasional yang berjalan secara konsisten. Kondisi ini bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta wajib menyediakan dan memelihara sarana pengelolaan sampah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, hal ini menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketidakberfungsian sistem pengangkutan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk lemahnya implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Fenomena ketiga adalah tidak adanya petugas khusus yang menangani pengangkutan sampah di Desa Sumanggi. Ketiadaan sumber daya manusia yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah menyebabkan pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah melalui perangkatnya memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan operasional pengelolaan sampah, termasuk dalam aspek pengangkutan dan pelayanan kebersihan. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip pelayanan

publik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, seperti membuang sampah sembarangan atau membakarnya.

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh kondisi yang lebih luas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana persoalan sampah masih menjadi tantangan serius. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program seperti Surung Sintak dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya, implementasi di tingkat desa masih menghadapi kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan konsistensi pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan program belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengelolaan sampah apabila tidak didukung oleh sistem pelaksanaan yang memadai dan keterlibatan masyarakat yang aktif. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Sumanggi tidak hanya memerlukan pendekatan struktural melalui penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pendekatan sosial melalui pemberdayaan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks ini, pendekatan innovative governance menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi

permasalahan sampah, sehingga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi yang meliputi aspek perilaku masyarakat, kelembagaan, serta implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengelolaan sampah dilaksanakan di Desa Sumanggi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Pengelolaan Sampah di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah."

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan masalah mengenai Pengelolaan Sampah Di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Maka masalah penelitian ini dibatasi menurut teori George R. Terry (2021:15-19) fokus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan semua uraian di atas, maka manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan tata kelola pemerintahan desa (*innovative governance*). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi

akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, khususnya dalam penyediaan layanan pengangkutan, pemanfaatan sarana prasarana, serta penguatan peran kelembagaan desa.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

c. Bagi Pemerintah Daerah (DLH)

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran, khususnya di wilayah pedesaan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.